

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan kemudian untuk mengetahui bagaimana upaya instansi terkait dalam pengelolaan Gedung Olah Seni dan Budaya (GOSB) Jambi. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi (Disbudpar) Jambi. Gedung Olah Seni dan Budaya (GOSB) Jambi merupakan salah satu gedung milik pemerintah dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Namun demikian, meskipun gedung ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi (Disbudpar) Jambi, selama ini pengupayaan pengelolaan gedung ini tidak berfungsi secara maksimal sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai gedung pertunjukan seni dan budaya. Gedung ini hanya digunakan masyarakat umum sebagai tempat pesta perkawinan saja, sangat jarang aktivitas yang dilakukan oleh seniman di dalam maupun halaman pelataran gedung ini. Selain itu gedung ini memiliki berbagai permasalahan klasik dari segi infrastruktur yang tak kunjung mendapat perbaikan. Maka dari itu di butuhkan suatu kebijakan tersendiri yang berupa Peraturan Daerah guna secara khusus mengatur dalam pengelolaan Gedung Olah seni dan Budaya (GOSB) Jambi dan membentuk pengorganisasian yang mengerucut khusus. Sehingga segala kegiatan dapat terarah kepada sarannya dan dapat lebih fokus dalam penggerakan teknis pengelolaan Gedung ini.

Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah, Pengelolaan, Gedung Olah Seni dan Budaya

ABSTRACT

This thesis aims to determine the form of policies made by the government, and then to find out how the efforts of the relevant agencies in managing the Jambi Arts and Culture Building. The research was conducted based on observation, interviews and documentation. The research location is at the Jambi Culture and Tourism Office. The Jambi Arts and Culture Building is one of the government-owned buildings and is managed by the Jambi Culture and Tourism Office. However, even though this building is managed by the Jambi Culture and Tourism Office, so far the management efforts of this building have not functioned optimally in accordance with its designation, namely as a building for performing arts and culture. This building is only used by the general public as a wedding party venue, There are very few activities carried out by artists in or in the courtyard of this building. In addition, this building has various classic problems in terms of infrastructure that have never been repaired. Therefore, it is necessary to have a separate policy in the form of a Regional Regulation to specifically regulate the management of the Jambi Arts and Culture Building and form a special organization. So that all activities can be directed to their targets and can focus more on the technical movement of this building.

Keywords: Policy, Government, Management, Arts and Culture Building